BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Hilmudin, 2019) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan sebuah hubungan ataupun kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang di dalamnya melibatkan orang lainnya dalam hal ini adalah *agents*. Pada sebuah perusahaan akan terdapat pemisah antara kepentingan prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan orang yang menanamkan modal ke perusahaan sedangkan agen adalah orang yang memiliki pekerjaan dan memberikan informasi terkait dengan yang dibutuhkan oleh prinsipal. Hubungan yang terjadi di antara prinsipal dengan agen adalah ketika prinsipal memberikan wewenang kepada agen dalam pengambilan keputusan bisnis yang saling menguntungkan di perusahaan dan akan dijadikan sebagai sumber informasi kepada prinsipal dalam mengambil keputusan.

Teori keagenan ini akan memberikan dampak yang asimetris antara pemilik dan pengelola perusahaan, untuk menghindari terjadinya hubungan tersebut maka dibutuhkan sebuah konsep, yaitu *corporate governance* yang memiliki tujuan untuk membuat perusahaan menjadi lebih sehat (Pricilla, 2017). Berdasarkan teori agensi, maka penerapan adri *corporate governance* ini dapat dijelaskan melalui hubungan yang terjadi di antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan keuntungan kepada pemilik,

agen memiliki tanggung jawab moral dalam mengoptimalkan keuntungan dari pemilik dan sebagai imbalannya maka akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan kontrak yang berlaku.

Nugroho (2017) menjelaskan bahwa hubungan agensi akan terjadi ketika prinsipal mempekerjakan orang lain dalam hal ini agen untuk memberikan sebuah jasa dan kemudian memberikan wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen itu sendiri. Dengan demikian, maka agen bisa melakukan manipulasi pelaporan tentang perusahaan untuk disampaikan kepada prinsipal, hal ini dapat terjadi oleh karena setiap manajer memiliki kebutuhan ekonomi yang besar, termasuk memaksimalkan kompensasinya dengan melakukan praktik kinerja keuangan. teori keagenan akan digunakan untuk memahami isu *corporate governance* (komisaris independen dan komite audit) dan Kinerja keuangan.

2.2 Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja adalah sebuah istilah yang pada umumnya dipergunakan untuk sebagian ataupun seluruh tindakan daripada sebuah organisasi para satu periode dengan menggunakan referensi jumlah standar. Kinerja keuangan merupakan sebuah analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk melihat sejauh mana sebuah perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan dengan baik dan benar. Sebuah kinerja keuangan

perusahaan dikatakan baik ketika pelaksanaan aturan yang berlaku sesuai baik dan benar (Fahmi, 2018).

Kinerja keuangan merupakan tercapainya sebuah prestasi dari perusahaan selama periode yang ditentukan akan pengelolaan keuangan perusahaan. dengan prestasi maka sebuah perusahaan bisa menunjukkan kinerjanya (Oktalia, 2020). Kinerja keuangan juga merupakan sebuah tingkat kesuksesan yang diperoleh perusahaan sehingga dapat memperoleh hasil dari pengelolaan keuangan yang baik (Fajri, 2018).

Kinerja keuangan dijadikan menjadi sebuah tolak ukur untuk mengetahui bagaimana tingkat kesuksesan daripada perusahaan jika dilihat dari hal finansial yang akan diterapkan oleh para investor dan stakeholder untuk dipertimbangkan, baik dalam hal evaluasi ataupun untuk merumuskan kebijakan yang berkenan dengan perbaikan dan juga peningkatan kinerja keuangan dari sebuah perusahaan (Anita, 2021).

Kinerja daripada sebuah perusahaan juga dikatakan sebagai sebuah pencapaian perusahaan dalam kerja yang sudah diselesaikan dengan standar tertentu pada satu periode. Kinerja keuangan perusahaan merupakan jumlah nilai yang dapat diperoleh perusahaan melalui kegiatan operasinya untuk mendapatkan keuntungan. Besar ataupun kecilnya laba yang diperoleh perusahaan dapat menjadi cara dalam penentuan baik atau tidaknya Kinerja keuangan perusahaan (Tinamo, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan sebuah bentuk prestasi yang dihasilkan oleh perusahaan dalam pengelolaan keuangan dan juga mendeskripsikan kondisi kinerja dari sebuah perusahaan.

2.2.2 Faktor-faktor Yang mempengaruhi Kinerja keuangan

Munawir (2007) dalam (Hilmudin, 2019) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dari sebuah perusahaan, yaitu sebagai berikut:

- Likuiditas yang akan menunjukkan kemampuan dari sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi ketika ditagih.
- Solvabilitas yang akan menunjukkan kemampuan daripada perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangannya
- 3. Profitabilitas yang akan menunjukkan kemampuan daripada perusahaan dalam memperoleh laba selama periode yang ditentukan
- Stabilitas ekonomi yang akan menunjukkan kemampuan daripada perusahaan dalam melakukan usahanya dengan stabil tanpa mengalami krisis keuangan.

2.2.3 Pengukuran Kinerja Keuangan

Tujuan pengukuran daripada kinerja keuangan yang digunakan oleh perusahaan adalah untuk melakukan perbaikan di atas operasionalnya agar

mampu bersaing dengan emiten lainnya. Analisis pada kinerja keuangan adalah sebuah proses pengkajian secara kritis akan review data, perhitungan, pengukuran, interpretasi juga pemberian solusi akan keuangan perusahaan dalam sebuah periode yang ditentukan.

Faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap Kinerja perusahaan, di antaranya adalah profitabilitas, *growth oppurtunity*, struktur modal juga ukuran perusahaan. Beberapa faktor tersebut mempunyai hubungan dan juga berpengaruh akan nilai perusahaan yang tidak konsisten. Kinerja daripada perusahaan tidak hanya bergantung kepada kemampuan dalam menghasilkan arus kas, tetapi juga bergantung pada karakteristik operasional dan juga keuangan perusahaan. dengan demikian, maka setiap badan usaha akan senantiasa berusaha dalam meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi nilai daripada profitabilitas suatu badan, maka kelangsungan hidup daripada perusahaan itu juga akan lebih terjamin (Fajri, 2018).

Kinerja daripada perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan analisis Tobin's Q. Analisis Tobin's Q pertama kali diperkenalkan oleh Nicholas Kaldor pada tahun 1966. Kemudian rasio ini diperkenalkan kembali pada tahun 1968 oleh James Tobin, seorang ekonom Amerika yang memenangkan *Nobel Memorial Prize in Economic* pada tahun 1981 (Kompasiana, 2017).

Tobin's Q dihitung dengan menggunakan perbandingan antara rasio pasar saham perusahaan dengan nilai buku perusahaan menurut konsepnya. Berikut rumus yang digunakan dalam mengukur Tobin's Q (Prasetyorini, 2013):

$$Tobin's \ Q = \frac{Market \ Value \ Equity + Debt}{Total \ Asset}$$

Keterangan:

MVE :Nilai Pasar dari Ekuitas (total jumlah saham beredar dikali *closing price*)

Debt : total hutang

2.3 Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance)

2.3.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan adalah sebuah sistem yang di dalamnya mengatur dan juga mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan juga meningkatkan nilai daripada perusahaan terhadap para pemegang saham (Effendi, 2017). Tata Kelola Perusahaan merupakan seperangkat tata hubungan yang terjadi di antara manajemen perseroan, direksi, komisaris dan para pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran daripada Tata Kelola Perusahaan yang baik terhadap perusahaan akan menunjang aktivitas operasional daripada perusahaan. selain daripada itu mekanisme pelaksanaan daripada Tata Kelola sebuah perusahaan harus menjadi perhatian utama daripada perusahaan demi kelancaran kegiatan dalam perusahaan. mekanisme Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah ketika mempunyai keterkaitan dengan kemakmuran perusahaan dan juga kemakmuran para pemegang sahamnya, dengan demikian penerapannya juga diharapkan memberikan kontribusi yang positif terhadap perusahaan secara keseluruhan (Zuhdi, 2020).

Corporate Governance adalah sebuah studi yang di dalanya mempelajari mengenai hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap satu perusahaan dan juga hubungan yang terjadi antar sesamanya. Corporate Governance juga diartikan sebagai sebuah struktur, sistem juga proses yang dipergunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah terhadap perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang (Azizah, 2021).

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan sebuah mekanisme yang mengatur juga mengendalikan perusahaan melalui hubungan yang terjadi di antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan juga para pemegang saham lainnya.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan

Prinsip-prinsip *corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) yang dikenal dengan istilah "TARIF" yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Transparansi

Transparansi (transparency) mengandung pengungkapan (disclosure) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh stakeholder. Transparansi diperlukan agar perusahaan menjalkankan bisnis secara objektif dan profesional. Dalam prinsip ini, informasi harus diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan

antara lain keadaan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan keuangan perusahaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas (accountability) mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggung jawabkannya. Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris independen dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholder lainnya.

3. Responsibilitas

Responsibilitas (responsibility), perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai warga korporasi yang baik (*good corporate citizen*). Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

4. Independensi

Independensi (indenpendency), perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan beserta seluruh jajaran bawahnya tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun.

5. Fairness

Kewajaran dan kesetaraan (fairness) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pemberlakuan prinsip ini di perusahaan akan melarang praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam merugikan pihak lain. Setiap anggota direksi harus melakukan keterbukaan jika menemukan transaksitransaksi yang mengandung benturan kepentingan.

2.3.3 Tujuan dan Manfaat Tata Kelola Perusahaan

Tata Kelola Perusahaan mempunyai lima macam tujuan utama yaitu :

- 1. Melindungi hak dan kewajiban pemegang saham,
- 2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota stakeholders non pemegang saham,
- 3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham,

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Dewan Pengurus atau
 Board of Directors dan manajemen perusahaan, dan
- 5. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan.

FCGI (2001) menyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan mempunyai empat manfaat antara lain. Pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*. Kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dari investor maupun kreditur (menurunkan *cost of capital*). Ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholder's value* dan dividen.

2.3.4 Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Mekanisme *good corporate governance* dalam penelitian ini dimana bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi halhal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen (Oktamawati, 2017).

Pada penelitian ini yang akan dipergunakan sebagai variabel independen adalah tata kelola perusahaan yang terdiri dari dewan direksi, dewan komisaris, komisaris independen, dan juga komite audit.

Menurut KNKG (2006) Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama.

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris maka perusahaan akan lebih diawasi dan dapat memineralisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terikat dengan dewan komisaris lainnya maupun dengan manajemen,

anggota dewan komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali. Dewan komisaris independen bertugas memelihara integritas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pengawasan dan fungsi penasihatan dapat dilakukan dengan benar (Martsila dan Meiranto, 2013).

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Tugas komite audit berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen (Oktamawati, 2017).

2.4 Leverage

Leverage mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan hutang. Rasio leverage ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan total hutang. Leverage merupakan sebuah penggunaan sejumlah aset ataupun dana yang dilakukan oleh perusahaan di mana dalam penggunaan aset ataupun dana tersebut, perusahaan harus mengeluarkan biaya tetap. Leverage dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik perusahaan. Selain itu leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk

membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan . Leverage adalah salah satu faktor penting yang mempengaruhi profitabilitas karena dapat meningkatkan modal perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan (Giska Savira, 2021).

2.5 Firm Size

Firm size ataupun ukuran perusahaan merupakan sebuah variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan kinerja keuangan daripada perusahaan. ukuran perusahaan adalah cerminan daripada total asset yang dimiliki oleh perusahaan. semakin besar ukuran daripada perusahaan, maka aset yang dimiliki perusahaan pun semakin besar sehingga dana yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mempertahankan kegiatan operasional nya pun semakin banyak. Semakin besar ukuran perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap keputusan manajemen dalam menentukan pendanaan apa yang akan dipergunakan oleh perusahaan (Hery, 2016).

Ukuran perusahaan (size) merupakan suatu indikator yang menunjukkan kekuatan finansial perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi nilai perusahaan, karena semakin besar ukuran atau skala perusahaan maka akan semakin mudah pula perusahaan memperoleh sumber pendanaan baik yang bersifat internal maupun eksternal.

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Setiawati, 2021) yang menggunakan objek penelitian Perusahaan Agicultur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-

2019 dengan menggunakan metode kuantitatif memperoleh hasil penelitian bahwa Tata Kelola Perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini komite audit memiliki peran yang penting dalam sebuah perusahaan dalam memberikan peningkatan kinerja keuangan perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Azizah, 2021) yang menggunakan objek penelitian Perbankan Syariah di Indonesia yang beroperasi pada Tahun 2017-2019 dengan menggunakan metode kuantitatif dan regresi linear berganda memperoleh hasil penelitian bahwa Tata Kelola Perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan. Dalam hal ini, dewan komisaris independen memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kinerja dari sebuah perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Santi, 2021) yang menggunakan objek penelitian Perusahaan Manufaktur Sub sektor Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019 dengan menggunakan metode kuantitatif memperoleh hasil penelitian bahwa Tata Kelola Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, yang artinya besar atau kecilnya jumlah daripada Tata Kelola Perusahaan menjamin keefektifan kinerja daripada Tata Kelola Perusahaan dalam mengawas kinerja keuangan perusahaan.

Table 2.1

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Variabel	Objek	Hasil Penelitian
1	Setiawati(2021)	Dependen:	Perusahaan	Tata Kelola Perusahaan
		Tata Kelola	Agricultur	memiliki pengaruh
		Perusahaan	yang terdaftar	yang signifikan
		Independen:	di BEI	terhadap Kinerja
		Kinerja Keuangan		Keuangan.
		CATIVIA	AYAL	
2	Azizah (2021)	Dependen:	Perbankan	Tata Kelola Perusahaan
	45	Tata Kelola	Syariah di	memiliki pengaruh
		Perusahaan	Indonesia yang	positif terhadap Kinerja
	2	Independen:	beroprasi pada	Keuangan.
		Kinerja Keuangan	tahun 2017-	
	5/		2019	$\langle \langle \langle \langle \langle \langle \rangle \rangle \rangle \rangle \rangle$
3	Santi (2021)	Dependen:	Perusahaan	Tata Kelola Perusahaan
		Reputasi	manufaktur	berpengaruh terhadap
		Perusahaan	sektor barang	Kinerja Keuangan.
		Independen:	konsumsi yang	
		Konsep	terdafrtar di	
		Corporate Social	BEI	
		Responsibility		
		(CSR)		

2.7 Kerangka Berpikir dan Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Kerangka Berpikir

Variabel Independen:

Gambar 2.1

Gambar 1. Kerangka Berpikir

Dewan Direksi (H1) H1 Dewan Komisaris (H2) Komisaris Independen (H3) H3 Kinerja Keuangan Komite Audit (H4) H4 Variabel Kontrol: Leverage Firm Size

2.7.2 Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dipergunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh daripada Tata Kelola Perusahaan terhadap kinerja keuangan (Studi empiris pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021).

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan
 Perusahaan

Menurut KNKG (2006) Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup 5 (lima) tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab sosial.

Kinerja keuangan merupakan penentuan yang dilakukan secara periodik yang di mana efektivitas operasi sebuah organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan juga kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Kinerja keuangan merupakan analisis yang

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perusahaan melaksanakan peraturan dengan benar (Fahmi, 2018).

Anggota dewan direksi dapat mengalami perubahan ukuran. Perubahan tersebut dapat disebabkan karena penurunan kinerja keuangan perusahaan. Ketika kinerja keuangan perusahaan sedang tidak sempurna, maka kondisi tersebut dapat membawa dampak perubahan jumlah dewan direksi di perusahaan. Perubahan ukuran dewan direksi yang terorganisir berguna untuk memberikan ide-ide baru dalam membuat perencanaan perusahaan menjadi lebih baik sehingga terdapat peningkatan kinerja keuangan perusahaan (Yunshi Liu et al., 2013). Penelitian oleh Naciti (2019); Rashid (2018); dan Zhou et al. (2018) menyatakan bahwa perubahan ukuran dewan direksi secara positif memengaruhi kinerja keuangan perusahaan karena dewan direksi memiliki kontribusi yang banyak dalam suatu perusahaan yaitu sebagai pemimpin perusahaan yang merencanakan strategi dan kebijakan perusahaan agar mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan demikian, dewan direksi diasumsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan, dengan hipotesis sebagai berikut:

H1 : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Ukuran dewan komisaris yang besar menyebabkan monitoring manajemen semakin baik. Jika lebih banyak dewan komisaris maka perusahaan akan lebih diawasi dan dapat memineralisasi kecurangan dalam perusahaan sehingga membuat kinerja keuangan perusahaan semakin meningkat. Penelitian Putra (2015) dan Dwi A.I (2019) membuktikan pengaruh dewan komisaris pada kinerja perusahaan adalah positif. Hal tersebut menujukkan bahwa dewan komisaris dengan skala besar menjadikan pengawasan terhadap manajemen juga semakin intens. Dengan demikian, dewan komisaris diasumsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan, dengan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

3. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut Widyati (2013), dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terikat dengan dewan komisaris lainnya maupun dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, maupun pemegang saham pengendali. Dewan komisaris independen bertugas memelihara integritas yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa

pengawasan dan fungsi penasihatan dapat dilakukan dengan benar (Martsila dan Meiranto, 2013). Dengan adanya dewan komisaris independen, maka kepentingan pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan karena dewan komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak manajer.

Jumlah komisaris independen dengan jumlah besar dalam perusahaan menandakan bahwa dewan komisaris akan melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan secara efektif dan efisien. Sehingga akan memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kebijakan manajemen yang telah dan akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan. Menurut Widyati (2013), Agatha (2020) dan Rahmatika et al (2019) mengatakan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, komisaris independen diasumsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan, dengan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

4. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Tugas komite audit

berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen (Oktamawati, 2017). Berkaitan dengan laporan keuangan, Komite Audit bertugas untuk memastikan integritas laporan keuangan, efektivitas pengendalian intern dan ketaatan Perseroan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memerlukan perhatian Direksi dan tugas lainnya yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite audit merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh dewan komisaris perusahaan yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya. Tugas dari komite audit adalah mengawasi penyusunan laporan keuangan agar terhindar dari kesalahan atau kecurangan dan diharapkan dapat memperkecil upaya manajemen untuk memanipulasi data-data yang berkaitan dengan keuangan. Komite audit berperan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan. Keberadaan komite audit akan membuat laporan keuangan terus terkendali sehingga kinerja keuangan juga akan semakin membaik. Berkaitan dengan kinerja keuangan, komite audit bertugas untuk memastikan bahwa tidak ada informasi menyesatkan yang akan dipulikasikan ke dalam laporan keuangan perusahaan serta memastikan terselenggaranya efektifitas dari pengendalian intern, pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. Menurut dan Gill dan Obradovich

(2012) Sari dan Setiyowati (2017), Agatha (2020), *et al* mengatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian, komite audit diasumsikan memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan, dengan hipotesis sebagai berikut:

H4 : Komite Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja
Keuangan

